

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan PDB sebuah negara dan juga pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Pembangunan ekonomi jangka panjang ini berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial dan juga pembangunan ilmu pengetahuan, hal ini didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi yang diharapkan meningkat dari tahun ke tahun (Sukirno, 2007).

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada pada daerah tersebut. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya jumlah penduduk semakin bertambah, pertambahan tersebut tidak hanya menjadi modal tetapi juga menjadi beban dalam pembangunan. Oleh karena itu fokus pembangunan ekonomi pada peningkatan kualitas sumber daya akan berdampak bagus pada kesejahteraan masyarakat (Gatiningsih dan Eko, 2017).

Indonesia merupakan negara yang masih memiliki 3 permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Pembangunan ekonomi didasarkan pada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang, dalam artian semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tercukupi, sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang menyenangkan. Namun di Indonesia kesejahteraan masih belum tercapai dengan baik (Purnamasari, 2019).

Menurut Siahaan, *et.al* (2001) indikator dan ukuran pembangunan ekonomi terdiri dari pendapatan per kapita dan pemerataan pendapatan. Pendapatan per kapita dihitung berdasarkan PDB jika diukur secara nasional dan PDRB jika diukur secara regional. Suatu negara/regional berhasil melaksanakan pembangunan apabila terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi yakni dilihat dari produktivitas negara/regional setiap tahun. Sedangkan pemerataan pendapatan merupakan faktor penting dalam penentuan kesejahteraan pada masyarakat. Berdasarkan indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa tingginya produktivitas atau pertumbuhan

wilayah mengakibatkan pendapatan terdistribusi relatif merata pada penduduk suatu negara/wilayah.

Pentingnya pemerataan menjadikan Indonesia merupakan negara yang berkomitmen untuk menciptakan *equity*, sebagai kesempatan yang setara dan berkeadilan dalam mendapatkan hak masyarakat secara individu. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia harus dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata. Oleh karena itu pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) (KOMINFO, 2017)

Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) merupakan sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengantisipasi dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga dapat mengurangi ketimpangan di masyarakat. Pemerataan ekonomi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat memiliki pendapatan, sandang, pangan dan papan seadil mungkin. Kebijakan ini dilandaskan pada 3 pilar utama yang perlu dikelola dan dikembangkan yaitu lahan, kesempatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kemenko RI, 2017)

3 pilar utama yang perlu dikelola dan dikembangkan yaitu lahan, kesempatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kemenko RI, 2017).

Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) akan baik apabila didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi yang harus saling bertumbuh dan saling memperkuat (KOMINFO, 2017)

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan parameter terwujudnya pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Nasional Bruto (PNB) tanpa berlandaskan pada perubahan besar kecilnya perubahan pada peningkatan penduduk maupun struktur ekonomi yang terjadi (Hasan dan Aziz, 2018).

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) diartikan sebagai upaya pencapaian pembangunan yang tidak lepas dari peningkatan kualitas ekonomi dari manusia yang dijadikan sebagai objek pembangunan itu sendiri.

Sukirno (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan nilai yang berukuran kuantitatif sebagai gambaran perkembangan suatu perekonomian pada tahun tertentu

Pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting dalam sektor perekonomian suatu wilayah yang bersentuhan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah yang sekaligus menjadi penentu suatu keberlanjutan ekonomi. Dengan kata lain, tujuan akhir pertumbuhan ekonomi yaitu kemakmuran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi (Hasan dan Aziz, 2018).

Keberlangsungan pertumbuhan ekonomi didorong oleh beberapa faktor, diantaranya pemerataan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Tahap awal perencanaan pembangunan bermula dari peningkatan produktivitas dan pemerataan pendapatan di masyarakat. Suatu negara yang dikatakan berhasil melakukan pembangunan digambarkan memiliki produktivitas yang tinggi dan juga distribusi pendapatan yang cenderung merata (Siahaan *et. al*, 2001).

Pemerataan pendapatan merupakan sebuah keadaan masyarakat yang memiliki kesempatan sama dalam perekonomian suatu wilayah dan juga suatu keadaan yang membuktikan tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Pemerataan pendapatan sebagai tolak ukur yang digunakan dalam melihat pembagian pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat, sehingga menghasilkan perhitungan dan persentase pendapatan per penduduk. Pemerataan pendapatan yang tidak tercapai pada suatu wilayah mengakibatkan tidak terciptanya kemakmuran bagi masyarakat secara umum melainkan hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja.

Salah satu indikator untuk melihat terjadinya pemerataan suatu wilayah yaitu koefisien gini ratio. pergerakan koefisien gini ratio berada pada rentang 0 hingga 1. Pemerataan pendapatan terjadi apabila indeks gini ratio menunjukkan angka mendekati 0, sebaliknya ketimpangan pendapatan terjadi apabila indeks gini ratio menunjukkan angka mendekati 1 (Yustinus, *et. al*, 2014)

Kondisi distribusi pendapatan di masyarakat memiliki perbedaan antar wilayah. Dalam suatu wilayah dengan masyarakat yang cenderung bekerja di

sektor pertanian akan mengalami ketimpangan yang lebih kecil daripada masyarakat yang cenderung bekerja di sektor industrial. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkat pendapatan individunya (Yustinus et.al, 2014).

Menurut Siahaan *et. Al* (2001) menyatakan bahwa indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh sektor produksi dalam kurun waktu tertentu.

Penyerapan tenaga kerja juga menjadi faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan kualitas ekonomi melalui perbaikan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sebuah indikator penting dalam pembangunan ekonomi (Faruq et.al, 2017).

Ketersediaan sumber daya manusia tidak lepas dari adanya pertumbuhan penduduk yang terjadi pada suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk yang terjadi menjadikan kebutuhan pangan meningkat. Hal ini dilandaskan pada Teori Malthus dalam Alma (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur dan persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Ketersediaan pangan akan berkurang seiring dengan pertumbuhan penduduk yang jauh lebih cepat, sehingga menyebabkan terjadinya kemiskinan pada suatu wilayah. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam peningkatan ketersediaan pangan dalam mencegah terjadinya kemiskinan di suatu wilayah dan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dalam pembangunan ekonomi.

Peningkatan produktivitas sektor pertanian dapat dilakukan pada suatu wilayah apabila jumlah penduduk selalu meningkat. Hal ini dilandaskan pada Teori Karl Marx dalam Alma (2019) yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan produktivitas melalui pemanfaatan tenaga kerja sebagai pengelola sumber daya yang ada pada suatu wilayah khususnya pertanian dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Hal ini dapat tercapai dengan dukungan pemerintah melalui kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam melakukan efisiensi dan efektifitas perekonomian di Indonesia baik secara

individu, kelompok dan masyarakat, sebagai fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi perekonomian di Indonesia (Musa, 2017).

B. Rumusan Masalah

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 2020 yaitu sebesar -1.60%. Berdasarkan lampiran 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari tahun 1987-2020 mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2011 hingga 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan (BPS, 2020).

Provinsi Sumatera Barat memiliki wilayah yang memiliki alam yang potensial dalam untuk pertanian. Karakteristik wilayah yang berada di dataran rendah dan dataran tinggi menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber air dan potensi lahan yang baik untuk pertanian. Pertanian di provinsi ini berkembang sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Keberagaman faktor alam dan faktor lain yang dimiliki telah menjadikan potensi alam semakin kuat untuk dapat dikembangkan. Berdasarkan sensus pertanian yang dilakukan pemerintah tahun 2013 menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam koridor ekonomi dengan kegiatan ekonomi utama yaitu pengembangan kelapa sawit dan karet. Berdasarkan lampiran dua sektor pertanian berkontribusi sebesar 22% terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat yang merupakan persentase terbesar dibandingkan sektor lainnya (BPS, 2020).

Berdasarkan data indeks gini ratio pada lampiran dua tergambar bahwa dari tahun 2013 hingga 2020 indeks gini ratio mengalami penurunan dalam artian distribusi pendapatan mulai mengalami pemerataan pendapatan di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari lampiran dua yang menggambarkan indeks gini rasio provinsi bergerak mendekati 0.

Menurut teori U terbalik yang dikembangkan oleh Kuznets bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki berbanding terbalik dengan distribusi pendapatan (Kuncoro, 2004). Teori tersebut berbeda dengan keadaan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 memiliki berbanding serah dengan distribusi pendapatan.

Berdasarkan lampiran tiga penyerapan tenaga kerja sektor pertanian cenderung mengalami peningkatan dari tahun 1987 sampai 2020. Penyerapan tenaga kerja merupakan syarat terjadinya pertumbuhan ekonomi. Alokasi sumber daya manusia yang efektif akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah (Gatiningsih dan Eko, 2017).

Menurut Teori Karl Marx dalam Alma (2019) menyatakan bahwa peningkatan tenaga kerja disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan tenaga kerja menyebabkan produktivitas sektor pertanian menjadi meningkat. Peningkatan tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya sektor pertanian dapat dilihat dari proyeksi pembangunan periode 2016-2021 yang mencantumkan realisasi APBD sebesar 2,86%. Hal tersebut menjadikan sektor pertanian berkontribusi besar terhadap PDRB dengan kontribusi sebesar 22%. Angka tersebut lebih besar dibanding sektor olahan, sektor industri dan sektor lainnya (RPJMD, 2016)

Berdasarkan proyeksi pembangunan periode 2021-2026 yang mengalokasikan APBD sebesar 10% pada sektor pertanian, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian dikarenakan angka tersebut lebih tinggi daripada tahun sebelumnya (RPJMD, 2021)

Berdasarkan Teori Adam Smith mengatakan bahwa sumber daya manusia menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Gatiningsih dan Eko, 2017: 87). Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah sumber daya manusia yang banyak di sektor pertanian namun pertumbuhan ekonomi masih mengalami penurunan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, para peneliti terdahulu masih mengkaji terkait kondisi ketimpangan pendapatan, dan belum ada yang mengkaji terkait pemerataan pendapatan khususnya Provinsi Sumatera Barat. Selain itu Dengan adanya peningkatan alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat dari 2,86% menjadi 10% apakah menjadikan produktivitas sektor pertanian meningkat melalui penyerapan tenaga kerja sektor pertanian . Hal inilah yang melandasi keterbaruan

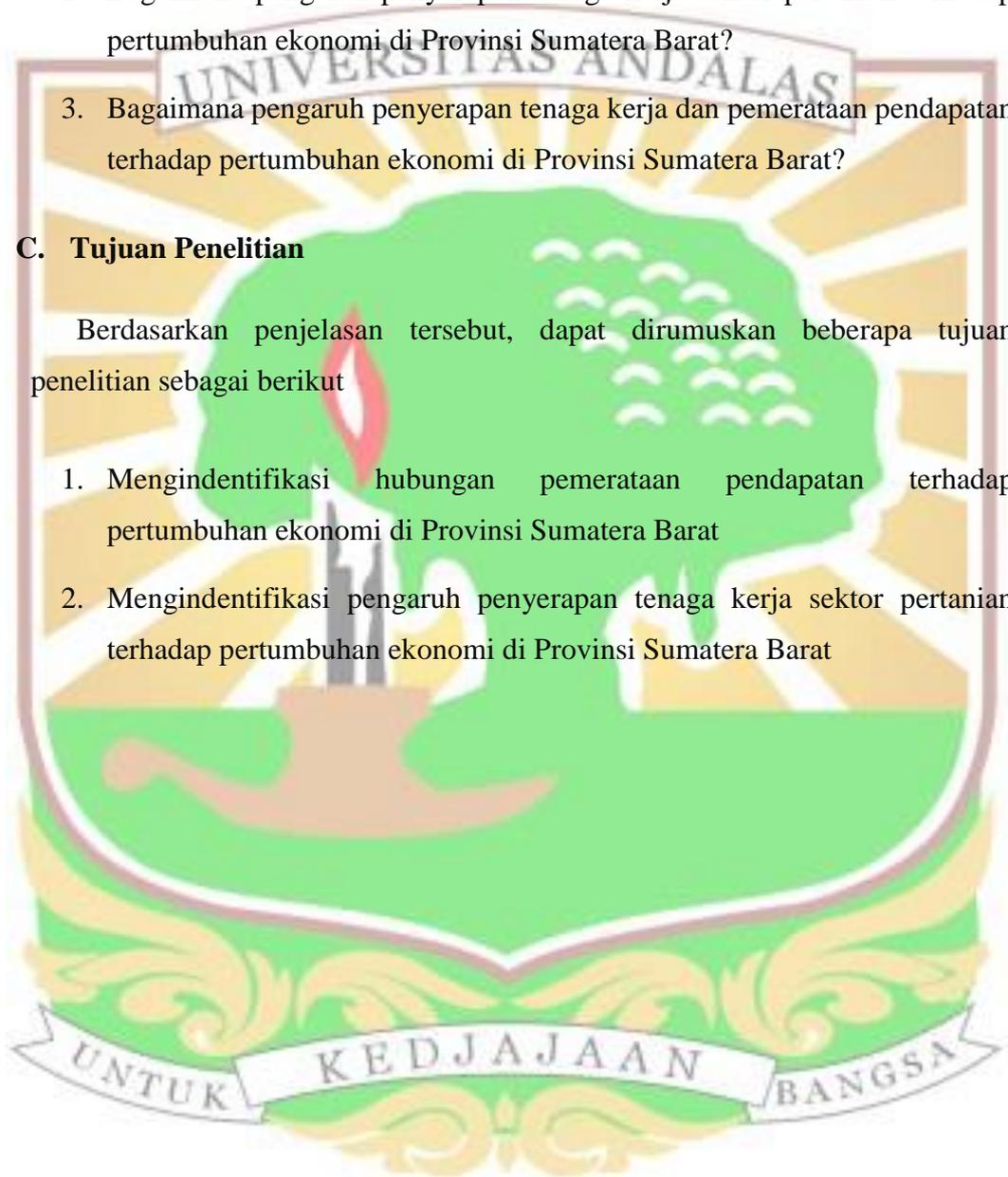
penelitian yang akan dikaji. Oleh karena itu munculah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemerataan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut

1. Mengidentifikasi hubungan pemerataan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat
2. Mengidentifikasi pengaruh penyerapan tenaga kerja sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai media pengembangan ilmu terkait pembangunan ekonomi yang mana lebih berfokus ada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan dan program peningkatan produktivitas pertanian di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Bagi masyarakat umum hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan mengambil tindakan pada usaha yang dijalankan
- c. Bagi mahasiswa hasil penelitian ini dapat digunakan dalam landasan penelitian yang akan diteliti dan dikembangkan
- d. Bagi institusi hasil penelitian ini dapat digunakan untuk informasi data penelitian dan bahan pembelajaran terkait dengan topik ini.

